



M. DIEN MADJID

Terpisah namun Terhubung: Orang Melayu Menghadapi Kolonialis Eropa di Melayu Nusantara pada Abad XIX

IKHTISAR: Artikel ini, dengan menggunakan metode sejarah, membahas beberapa kasus historis yang melibatkan orang Melayu dari tiga teritori, yakni Bangka, Brunei Darussalam, dan Singapura. Orang Melayu merupakan sekumpulan etnis yang banyak menghuni pulau-pulau di Asia Tenggara. Sebelum diberlakukannya konsep negara-bangsa, hubungan mereka tidak mengenal identitas perbedaan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Kebudayaan mereka mempunyai kesamaan, meski di beberapa tempat memiliki perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangka, Brunei, dan Singapura merupakan bagian kecil dari dialektika besar orang Melayu dalam menghadapi kolonialis Eropa. Meskipun sesama Melayu, ternyata dalam bidang politik, pandangan mereka bersifat distingtif. Sebagian ada yang berkoordinasi dengan orang Eropa dan menjadikan mereka sebagai rekan yang menguntungkan, sebagaimana nampak dalam kasus Brunei Darussalam dan Singapura; di sisi lain, ada yang dengan tegas meneriakkan perang kepada bangsa Eropa, seperti dalam kasus Bangka di Indonesia. Orang-orang Eropa memang datang dengan pembaruan; dan harus diakui, kita ikut tercerahkan berkat peranan mereka. Namun, mereka juga menanamkan kebencian, terutama bagi negeri-negeri yang sebelumnya pernah dijajah. Ingatan tersebut akan menjadi imaji yang terus mengendap di masa-masa yang akan datang.

KATA KUNCI: Orang Melayu; Bangka, Brunei, dan Singapura; Kolonialisme Eropa; Terpisah namun Terhubung; Dinamika Sosial-Politik.

ABSTRACT: "Separated but Connected: Malay Encountered European Colonialists in Malay Archipelago in the XIX Century". This article, using historical methods, discusses some historical cases involving Malays from three territories, namely Bangka, Brunei Darussalam, and Singapore. The Malay is an ethnic group inhabiting many islands in Southeast Asia. Prior to the enactment of the nation-state concept, their relationship did not recognize the identity of difference, whether social, political, or economic. Their culture had something in common, though in some places had a difference. The results show that Bangka, Brunei, and Singapore were a small part of the great Malay dialectic in facing the European colonialists. Although fellow Malays, apparently in politics, their views were distinguishable. Some were coordinating with Europeans and making them as profitable partners, as evident in the cases of Brunei Darussalam and Singapore; on the other hand, some were firmly shouting war to Europeans, as in the case of Bangka in Indonesia. The Europeans came up with renewal; and admittedly, we are enlightened thanks to their roles. But, they also instill hatred, especially for countries previously colonized. The memory will be an image that continues to settle in the future.

KEY WORD: Malay; Bangka, Brunei, and Singapore; European Colonialism; Separated but Connected; Social-Political Dynamics.

About the Author: Prof. Dr. M. Dien Madjid adalah Guru Besar Sejarah di UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah, Jalan Ir. H. Djuanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15412, Banten, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: dienmadjid@uinjkt.ac.id

Suggested Citation: Madjid, M. Dien. (2018). "Terpisah namun Terhubung: Orang Melayu Menghadapi Kolonialis Eropa di Melayu Nusantara pada Abad XIX" in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Volume 6(1), March, pp.27-42. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

Article Timeline: Accepted (January 17, 2018); Revised (March 2, 2018); and Published (March 30, 2018).

PENDAHULUAN

Orang Melayu merupakan sekumpulan etnis yang banyak menghuni pulau-pulau di Asia Tenggara. Sebelum diberlakukannya konsep negara-bangsa (*nation state*), hubungan mereka tidak mengenal identitas perbedaan politik, sosial, dan ekonomi. Kebudayaan mereka mempunyai kesamaan, meski di beberapa tempat memiliki perbedaan. Melayu merupakan suku besar yang melahirkan sub-suku lain, yang saling memperkaya satu dengan lainnya (Reid, 2001; Barnard ed., 2004; dan Bellwood, 2007).

Menginjak abad ke-19, hampir seluruh Asia Tenggara disapu oleh gelombang kolonialisme Barat. Inggris dan Belanda memainkan peran penting dalam menanamkan pengaruh kuasa Barat di tengah ruang publik negeri-negeri Malayu. Respon atas menguatnya pengaruh Barat di kalangan Melayu adalah beragam, di antara orang Melayu ada yang melantangkan kalimat perang, tidak sedikit yang memilih berkolaborasi untuk niat yang lebih baik. Kerjasama dengan orang Eropa memang tidak sepenuhnya buruk, dalam beberapa segi, langkah kooperatif ditempuh untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (Reid, 2004; dan Ricklefs *et al.*, 2010).

Penulis membatasi aktivitas orang Melayu ke dalam tiga cakupan kawasan yang dewasa ini melingkupi teritori negara Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ketiga negara ini dihuni oleh etnis Melayu dan mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Jauh ketika belum terbentuk jejaring, baik kolonialisme maupun politik modern, orang-orang Melayu yang berdiam di tiga negara itu sudah saling sapa, berkerabat, dan saling bantu tatkala menghadapi kesulitan, terlebih yang menyangkut keamanan negeri (Hall, 1985; Reid, 2004; dan Ricklefs *et al.*, 2010).

Artikel ini, dengan menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 1994; dan Sjamsuddin, 2007), akan membahas beberapa kasus historis yang melibatkan orang Melayu dari tiga teritori tersebut. Pola eksplanasi sejarah yang disajikan berkisar pada pengkisahan sejarah sosial dan bersifat kualitatif, yang menghubungkan antara sejarah kecil dengan sejarah besar (Kartodirdjo, 1993; dan Cresswell, 1998). Mungkin saja, beberapa tema masih asing terdengar di telinga pembaca, mengingat di Indonesia sendiri tema-tema sejarah tertentu masih hidup di tataran sejarah lokal (Widja, 1989; dan Abdullah ed., 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan Orang Melayu di Pulau Bangka. Pulau Bangka merupakan seonggok daratan yang terdapat di lepas pantai Sumatera Selatan, Indonesia. Pulau ini dikenal sebagai penghasil salah satu batuan yang mempunyai nilai tinggi di pasaran dunia sejak masa yang lama, yakni timah. Barang tambang ini menjadi primadona dalam kenangan orang Bangka. Melalui pengelolaan dan penjualan komoditas timah, orang Bangka menanggung untung yang berlipat ganda, sehingga mampu menghidupi kesehariannya (Sujitno, 2007; dan Suprpto, 2010).

Penduduk Bangka mayoritas beretnis Melayu. Orang China menduduki peringkat kedua. Baik orang Melayu maupun orang China, serta suku bangsa lainnya, hidup dalam suasana yang harmonis. Keduanya dipersatukan oleh komoditas timah, sebagai barang yang menggenapi kesejahteraan mereka (ISEAS, 2003; dan Sujitno, 2007).

Orang Melayu Bangka terbagi dua, sebagian ada yang tinggal di pedalaman, yang lain mendiami kawasan pesisir. Wilayah pesisir barat Bangka berdekatan dengan Palembang. Dua daerah ini dipisahkan

oleh Selat Bangka. Meskipun pulau Bangka berdekatan dengan Palembang, keduanya mempunyai dialek bahasa yang berbeda. Jika orang Palembang banyak menggunakan akhiran “o” dalam pelafalan katanya, seperti: “dimano”, “kemano”, dan “apo”; maka orang Bangka menggunakan akhiran kata “e”, misalnya: “dimane”, “kenape”, dan “ape” (Dunggio *et al.*, 1983; dan Mustafa *et al.*, 1984).

Tanah di Bangka bukanlah lahan yang subur untuk ditanami segala jenis tanaman. Tanah di sini berpasir dan di beberapa daerah kering berdebu. Kegersangan itu nyatanya tidak berlaku bagi semua jenis tanaman. Terdapat juga beberapa tanaman yang tumbuh dan menghasilkan hasil panen yang bernilai tinggi, seperti lada. Lada Bangka merupakan salah satu barang yang dicari di pasaran dunia. Sebelum kedatangan orang Eropa, lada Bangka banyak dijajakan oleh penduduk lokal kepada orang Arab dan orang China. Paska jatuhnya Sriwijaya pada abad ke-14, orang Arab menjadi etnis yang mengambil kesempatan sebagai pedagang utama di kawasan perairan Sumatera bagian timur (Jumhari, 2010; Nawiyanto & Endrayadi, 2016; dan Coedes, 2017:327).

Dalam konteks ini, A.A. Bakar (1969) menyebutkan bahwa terhitung sejak tahun 1710, timah Bangka sudah dikenal dunia. Saat itu, Bangka sudah berada di bawah kekuasaan kesultanan Palembang. Pada tahun 1722, Sultan Ratu Anom Kamaruddin, Raja Palembang saat itu, memberikan hak monopoli pembelian timah kepada Belanda. Sejak saat itu pula, keuntungan penduduk Bangka dari penjualan komoditas timah meningkat drastis. Menginjak tahun 1740, produksi timah Bangka mencapai masa-masa kegemilangannya (Bakar, 1969:8-9).

Hal ini mengakibatkan Persekutuan Dagang Belanda atau *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, disingkat

VOC, tidak mampu lagi membeli kelebihan kontraknya. Fenomena tersebut membuka lahirnya praktek-praktek perdagangan gelap, berupa penyelundupan dan pelbagai kecurangan seputar perdagangan timah. Penyelewengan-penyelewengan inilah yang menjadi faktor pemicu lahirnya Perang Bangka pada pertengahan abad ke-19 (Abdullah, 1983:44; dan Zulkarnain, 2003).

Depati Bahren, salah seorang bandar timah terkemuka di Bangka, mulai diusik ketenangannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka menilai sosoknya merupakan halangan bagi Belanda untuk lebih kuat menanamkan pengaruhnya di Bangka. Lewat serangkaian hasutan dan tuduhan, pemerintah kolonial Belanda menuntut ganti rugi kepada keluarga Depati Bahren, yang dijatuhi dakwaan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum atau *openbare rust en orde* (Abdullah, 1983; dan Sujitno, 2011).

Semenjak kedatangan Belanda, keadaan masyarakat Bangka jauh dari kemakmuran. Kompeni Belanda mulai menekan rakyat untuk lebih giat menambah produksi timah. Adapun bidang penghidupan lain, seperti pertanian, perniagaan, dan kerajinan tangan, dianggap tidak penting. Bagi penduduk kecil, tidak ada pilihan lain, jika masih ingin menyambung hidup, maka suka atau tidak suka, mereka harus bekerja di tambang timah milik orang Eropa (Erman, 2009; dan Elvian, 2012:61-62).

Pada tanggal 14 Desember 1819, A.P. Smissaert, Residen Bangka, melakukan kunjungan ke beberapa kampung di pedalaman Bangka. Ketika ia sampai di *Aek Buku* (Sungai Buku), ia dicegat oleh sekawanan orang pribumi. Setelah beberapa lama terjadi perkelahian, A.P. Smissaert berhasil dilumpuhkan, kemudian kepalanya dipenggal. Kepala A.P. Smissaert, administrasi Kompeni Belanda itu, kemudian dikirimkan ke hadapan Sultan Mahmud Badaruddin,

Raja Palembang, sebagai bukti bahwa bukan hanya Palembang yang sedang berperang melawan Belanda, di Bangka pun juga sebentar lagi akan berlangsung perang raya (Mutawalli, 2012; dan Nawayanto & Endrayadi, 2016).

Sejak saat itu, patroli Belanda mulai sering dilakukan untuk membatasi perlawanan penduduk setempat. Para pejuang Bangka tidak kehabisan akal, mereka pun menerapkan taktik gerilya untuk mengimbangi kelengkapan persenjataan milik musuh (Alfian ed., 1984:49-50). Sejak itu pula ditetapkan bahwa pulau Bangka merupakan wilayah yang berbahaya bagi kepentingan pihak kolonial Belanda (Madjid, 2015:34, 2017a dan 2017b).

Sejak kejadian di *Aek Buku*, nama Depati Bahren semakin disegani oleh pemerintah kolonial Belanda. Dr. Franz Epp, seorang tenaga kesehatan asal Jerman, pernah berjumpa dengan sosok pemimpin Bangka tersebut. Ia menangkap kesan bahwa Depati Bahren adalah pribadi yang memiliki wibawa. Keberanian memenggal kepala Residen Bangka pada masa kolonial Belanda, A.P. Smissaert, adalah suatu keberanian yang patut dipuji. Dengan segera, nama Depati Bahren menjadi tenar melebihi nama-nama besar para perwira kolonial Belanda di Bangka (Epp, 1852:74-75). Dr. Franz Epp juga memuji ketangguhan panglima Depati Bahren, yang tidak lain adalah anaknya sendiri, yakni Depati Amir. Pemuda itu disebutnya sebagai “orang yang berbahaya” (*cf* Epp, 1852:74-75; dan Erman, 2017:3).

Karena faktor usia, Depati Bahren mengundurkan diri dari medan laga. Ia menyerahkan tongkat komandonya kepada anaknya, Depati Amir, dan kepada adiknya, Panglima Hamzah Cing. Sosok Depati Amir bukanlah nama asing bagi pemerintah kolonial Belanda. Dia merupakan pejuang Melayu yang cekatan dan pandai merumuskan strategi. Ia banyak melakukan terobosan-terobosan agar

pasukan yang dipimpinnya di Bangka dapat selalu keluar dari situasi sulit (Madjid, 2017a dan 2017b).

Di hadapan warga Bangka, Depati Amir menjelma menjadi sosok yang terkenal ketegasannya. Bagi penduduk Bangka, yang tidak berkenan berpartisipasi dalam perang Bangka, maka kampungnya dijatuhi hukuman. Depati Amir juga pernah menunjukkan kemurkaannya kepada penduduk Kampung Lukok. Ia dan pasukannya membakar kampung tersebut, akibat penduduknya menolak untuk bekerjasama dengan pejuang Bangka (Madjid, 2015:45-46).

Depati Amir dikenal mempunyai pergaulan yang luas. Pengikut dan simpatisannya bukan hanya orang Bangka, melainkan juga para pembesar dan pekerja tambang China. Beberapa orang kaya China dikabarkan menyuplai persediaan logistik bagi Depati Amir. Sebagian lain dari mereka, ada yang menjadi sukarelawan untuk berangkat ke Singapura dan memasok senjata bagi Depati Amir. Para pekerja China juga dikabarkan pernah melakukan aksi mogok massal dan bergabung dalam barisan pejuang Depati Amir. Ko So Sie, misalnya, adalah salah satu kawan akrab Depati Amir yang kerap membantu para pejuang Bangka di medan laga (Madjid, 2015:94-103).

Dalam sumber lain disebutkan bahwa Ko Su Sui (Ko So Sie) memberikan sejumlah pasukan untuk gerilyawan Bangka. Ia menjadi agen pemasok pasukan rakyat, yang sebelumnya menjadi kuli di parit timah di Singli. Selain dirinya, tiga orang China Muslim bernama Raman, Akim, dan King Tjoan, juga membantu pengadaan senjata tajam, hasil karya mereka sendiri. Ketiganya berjasa mengumpulkan 60 orang dari Batin Maras, yang digabungkan dengan pasukan Depati Amir (Madjid, 2015, 2017a dan 2017b).

King Tjoan, seorang China Muslim,

juga berperan dalam mendistribusikan candu untuk para pejuang Bangka. Manakala Akim menyempatkan diri ke Singapura untuk mendapatkan mesiu. Candu pada saat itu digunakan sebagai zat yang diyakini mampu meningkatkan gairah bekerja. Komoditas ini penting untuk mendongkrak semangat para pejuang (cf Cribb, 1988; Rush, 2000; Carey, 2008 dan 2014; dan Madjid, 2015, 2017a dan 2017b).

Dalam konteks ini, Pater Carey (2014) juga mengatakan bahwa candu menjadi kebutuhan yang wajib ada dalam pasukan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Pernah suatu ketika pasukan tersebut “jatuh sakit” dikarenakan hilangnya gairah bertempur, akibat pasokan candu yang telat tiba. Di Jawa, banyak kalangan pedagang China yang mempunyai bisnis penjualan candu (Carey, 2014:238-239).

Barisan tempur Depati Amir dikenal pandai memanfaatkan lokus geografis sebagai pertahanan, jalur rahasia, dan senjata. Sungai Layang, yang terletak di Bangka bagian tengah, menjadi jalur air yang biasa digunakan sebagai tempat lalu-lalang pasukan Depati Amir. Dikabarkan bahwa pasukan kompeni Belanda kerap kehilangan jejak ketika memburu pasukan Depati Amir, yang sudah berada di sekitar pesisir sungai tersebut (Madjid, 2015).

Di Ketimpeng, kawasan yang kini merupakan perkebunan di dekat Gunung Maras, terdapat pejuang bawahan Depati Amir, bernama Bujang Enggak. Ia dan beberapa pasukan lainnya memanfaatkan batang pohon berbentuk Y, sebagai ketapel besar, untuk menahan laju pasukan musuh.¹

Pada tanggal 7 Januari 1851, menurut catatan Belanda, Depati Amir dan Hamzah Cing ditangkap oleh pasukan Belanda. Walaupun begitu,

¹Lihat, misalnya, “Hasil penuturan Ali Usman, pemandu ekspedisi penelusuran jejak Depati Amir di Bangka, pada tanggal 20-22 November 2015”. *Catatan Penuturan Tidak Diterbitkan*, ada pada penulis.

perjuangan orang Bangka masih tetap berlanjut. Perwira Belanda masih membidik dua nama yang dianggap berbahaya, yakni Budjang Singkep dan Awang. Paska ditangkapnya Depati Amir, Budjang Singkep dan Awang tetap melakukan perlawanan bersama kombatan Bangka lainnya. Mereka membuktikan diri sebagai pemimpin perang yang mempunyai hubungan luas dengan para pembesar Melayu lainnya, termasuk di luar pulau Bangka. Hal ini diinformasikan melalui keterangan Residen Riau, yang meminta agar Sultan Lingga dan Raja Riau menangkap Budjang Singkep dan Awang, yang menyembunyikan diri ke Lingga.²

Di masa ketika batas *nation-state* belum ditetapkan, lautan sekitar Sumatera merupakan lautan bersama atau *mere nostrum*. Orang-orang Bangka bebas melakukan pelayaran ke Singapura, Lingga, atau ke tempat lain. Mereka berlayar di bawah ancaman patroli Belanda. Keterhubungan orang Melayu antar-pulau mengindikasikan bahwa di masa lalu, persatuan antar-orang Melayu telah terjalin dengan baik (Christanty, 2010; dan Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Masing-masing negara tentu mempunyai memori kolektif terkait wacana ke-Melayu-an bersama. Pandangan yang berbasis pada latar historis ini menjadi alasan tak terbantahkan bahwa kehidupan orang Melayu terjalin dengan harmonis, berbasiskan nilai gotong-royong. Nuansa kekerabatan tidak lekang, meskipun mereka terpisah oleh daratan (Zain, 1992; Bellwood, 2007; dan Susanto, 2016).

Kerjasama Brunei dan Inggris. Kesultanan Brunei Darussalam merupakan salah satu kerajaan tua di alam Melayu, yang masih eksis hingga saat ini (Leake, 1990; Hussainmiya, 1995; Mail, 2011; dan

²Lihat “Besluit, 25 Maret 1851, No.13”. *Arsip Kolonial Belanda Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].

Ghofur, 2015). Dalam perspektif sejarah, kita disajikan oleh prototipe orang Melayu yang berbeda dengan yang ditemukan di tempat lain. Jika di wilayah-wilayah pemukiman orang Melayu di Malaysia dan Indonesia pada masa lalu, misalnya, sempat mempunyai hubungan tarik-ulur dengan para pendatang dari Eropa, di Brunei justru sebaliknya. Dalam beberapa kesempatan penting, perangkat istana dan rakyat Brunei berkolaborasi dengan orang Eropa untuk suatu maksud. Sebagian besar pola yang terbangun di antara keduanya adalah dialog konstruktif yang berkesinambungan (Al-Sufri, 1992; Saunders, 2002; Hussainmiya, 2006; dan Rahman, 2016).

Bangsa Eropa yang mempunyai kenangan manis bekerjasama dengan bangsa Brunei adalah Inggris. Sebagaimana diketahui, Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang mempunyai pengaruh politik yang luas di dunia, bahkan masih terasa hingga saat ini. Pola komunikasi yang dibangun Inggris dengan penduduk lokal, berbeda dengan bangsa Eropa lainnya. Jika Portugis mempunyai misi untuk menegakkan agama Kristen di negeri seberang lautan; dan Belanda mempunyai pandangan konservatif tentang pola kolonialisme dengan menempatkan masyarakat Eropa sebagai golongan pertama, maka hal demikian tidak dijumpai dalam hubungan Inggris dengan aparaturnegeri dan masyarakat yang dikuasainya (Leake, 1990; Fieldhouse, 1999; Sutrisno, 2001; dan Ferguson, 2004).

Sekitar tahun 1820 dan 1821, William Farquhar, Residen Singapura pada zaman kolonial Inggris, berkirimsurat kepada Raja Api, putra dari Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826). Surat itu menyatakan bahwa Singapura akan terbuka bagi kapal-kapal pedagang Brunei. Sang Residen juga menjamin keamanan kapal-kapal dagang Brunei, yang bersandar

di Bandar Singapura. Kesultanan Brunei, tentu saja, merasa tersanjung dengan kiriman surat tersebut. Hal itu menandakan bahwa politik luar negeri Brunei telah menghadapi masa tinggal landas (Leake, 1990; Lysa & Jianli, 2008; dan Halkis, 2014).

Keinginan William Farquhar membina hubungan dengan Brunei didorong oleh azas manfaat, yang juga dirasakan oleh Singapura. William Farquhar merupakan Residen Singapura pertama. Sebagai administrator, dia dituntut untuk mampu membina hubungan dengan wilayah-wilayah jiran secara efektif dan hati-hati (Leake, 1990; dan Lysa & Jianli, 2008).

Dalam hal ini, Brunei merupakan salah satu kesultanan yang berdaulat dan belum dirasuki oleh kepentingan kolonial Belanda. Dengan mendekati diri kepada Brunei, Inggris mendapat rekanan yang bisa diandalkan untuk masa-masa ke depan. Singapura mendapat beberapa komoditas dagang penting dari Brunei, seperti kapur barus, sagu, lilin lebah, getah *jelutung*, dan sebagainya (Mail, 2011:77-79).

Bagi Brunei sendiri, Inggris merupakan negara besar yang bisa diandalkan. Meskipun berada di Borneo bagian utara, posisi Brunei tidak sepenuhnya aman dari intaian pihak kolonial Belanda. Pada tahun 1823, misalnya, Belanda telah memantapkan posisinya di Sambas, Kalimantan bagian barat. Untuk itu, Brunei merasa perlu untuk mengukuhkan kerjasama Brunei-Singapura, dengan mengirim duta perdagangan yang dikepalai oleh *Orang Kaya Digadong* ke Singapura pada tahun 1824. Hampir bersamaan dengan itu, di Serawak telah ditemukan barang tambang bijih *antimoni*. Komoditas ini, kemudian, menjadi barang ekspor utama Brunei ke Singapura (Al-Sufri, 1992; Lysa & Jianli, 2008; dan Susanto, 2016).

Untuk melebarkan sayap bisnis dan

pengaruh Brunei di manca-negara, negeri tersebut juga memperkuat hubungan dagang dengan Portugis di Makau. Relasi dengan Makau pertama kali disambung tatkala Sultan Muhammad Tajuddin berkuasa (1795-1804). Dari Brunei, Makau mendapatkan kapur barus, lada hitam, sarang burung, tripang, lilin lebah, dan rotan. Sedangkan dari Makau, para saudagar Brunei memperoleh kapas, kain sutera, teh, paku, serta barang-barang tembikar (Mail, 2011:78-79).

Inggris dan Belanda memang memiliki kemiripan, yakni sama-sama ingin mendulang untung yang melimpah-ruah dari hasil kerjasama dengan pemuka pribumi. Kehadiran mereka di kawasan Asia Tenggara didorong oleh semangat memperlebar kesempatan usaha dalam bidang ekonomi, terutama perdagangan rempah-rempah (Sutrisno, 2001; dan Donkin, 2003).

Hanya saja, perbedaan motif antar keduanya kian kentara, manakala dihubungkan dengan bagaimana komunikasi serta kontribusi yang diberikan oleh bangsa-bangsa Eropa itu kepada tanah-tanah atau daerah-daerah yang didudukinya. Inggris lebih suka mengikat kerjasama jangka panjang dengan para penguasa lokal, disertai dengan imbalan-imbalan serta kerjasama yang menguntungkan pada masa-masa selanjutnya. Hubungan Inggris dengan masyarakat lokal, umumnya, juga terbangun dengan baik (Sutrisno, 2001; Ferguson, 2004; dan Gouda, 2007).

Sedangkan Belanda, meskipun mereka datang sebagai saudagar, namun pada perkembangannya, niat mereka berubah menjadi *the ruling class* di Nusantara (Abdullah ed., 1992; dan Ricklefs, 1992). Menginjak abad ke-19, dengan demikian, banyak terjadi pergolakan rakyat di gugusan kepulauan Nusantara. Beberapa perang besar yang terjadi, seperti Perang Paderi di pantai barat Sumatera

(1821-1837), Perang Diponegoro di Jawa bagian tengah (1825-1830), dan Perang Aceh di ujung utara Sumatera (1870-1942). Ketiga perang tersebut merupakan sebagian dari bentrokan dahsyat yang dialami orang-orang Belanda di Nusantara (Veer, 1985; Abdullah ed., 1992; Dobbin, 2008; dan Carey, 2008 dan 2014).

Tentu saja, jumlah perang tersebut masih terus membengkak, apabila kita menyoisir sejarah lokal di Indonesia. Beberapa perang yang penulis teliti lainnya adalah Perang Kerinci di Jambi, yang dipimpin oleh Depati Parbo (Madjid *et al.*, 2017); dan Perang Bangka yang dikomandoi oleh Depati Amir (Madjid, 2017a dan 2017b).

Dalam pandangan Brunei, Belanda menjadi ancaman di perairan atau di daratan sekitar Borneo. Meskipun demikian, sebenarnya, kuasa Belanda atas Borneo tidaklah merata. Sampai dengan tahun 1846, Belanda hanya menitikberatkan perhatian di kota-kota pantai, yang sebelumnya telah diduduki. Pos-pos Belanda di wilayah perbatasan dengan Borneo-Inggris terkadang tidak dijaga oleh petugas. Perhatian Belanda akan daerah-daerah perbatasan di Borneo amatlah minim. Pemerintahan di sana hanya dibatasi pada masalah perdagangan dan keamanan (Ricklefs, 1992; dan Christanty, 2010).

Di pelabuhan, petugas Belanda akan mengambil bea dan cukai dari perdagangan candu dan garam. Urusan keamanan hanya difokuskan pada masalah kepolisian dan pengadilan. Orang Belanda, orang Belanda peranakan, serta orang pribumi bukan kelahiran Kalimantan berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan untuk urusan pribumi diserahkan kepada pemimpin-pemimpin lokal.³

³Lihat, misalnya, "Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848". *Arsip Kolonial Belanda Tidak Diterbitkan, Terjemahan Tahun 1973*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia], hlm.39.

Kekejaman yang ditorehkan orang Belanda di Nusantara agaknya tidak terlalu dirasakan oleh perangkat kerajaan dan masyarakat Brunei. Memang, pada awal kedatangannya, Inggris sempat terlibat ketegangan dengan penguasa lokal Brunei. Namun, terhitung sejak berdirinya kerajaan Serawak yang berdaulat di bawah kuasa *Rajah Putih*, yakni James Brooke, seorang Inggris kelahiran India, yang berhasil memantapkan kuasa di Serawak, maka hubungan yang dibina antara Serawak dengan kesultanan Brunei masih terjalin dengan baik. Walaupun demikian, terdapat sejumlah kemunduran, yakni lepasnya beberapa wilayah Brunei di Kalimantan ke tangan Serawak (Rahman, 1995; Andaya & Andaya, 2001; dan Mail, 2011).

Dalam bentangan sejarah dunia, terdapat banyak abnormalitas; dan James Brooke adalah salah satunya. Ia datang ke Borneo sekitar tahun 1839, untuk sejumlah urusan swasta. Karena kedekatannya dengan beberapa pembesar Brunei, pemerintah Inggris di Singapura belakangan mempercayainya sebagai duta Inggris di Serawak dan Brunei. Ia mempunyai kedekatan dengan Raja Muda Hashim, seorang Pangeran Brunei, yang dikenal mempunyai reputasi baik di kalangan pedagang Eropa, terutama Inggris (Gould & Bampfylde, 1989; dan Mail, 2011).

Pada masa pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin II, memerintah 1828-1852, dan tepatnya pada tahun 1836, terjadi sejumlah pemberontakan orang Dayak di wilayah Serawak. Selama beberapa tahun, pihak kerajaan Brunei belum berhasil memulihkan keadaan di sana. Raja Muda Hashim, kemudian, dibantu oleh James Brooke berhasil memadamkan perlawanan lokal tersebut. Pada tanggal 20 Desember 1840, kerusuhan itu berhasil dipadamkan. Atas jasanya, James Brooke dikukuhkan menjadi Wakil Kerajaan Brunei di

Serawak oleh Raja Muda Hashim, pada tanggal 24 September 1841 (Rahman, 1995; dan Mail, 2011:80-81).

Sebagai kerajaan yang memiliki wilayah kuasa luas, Brunei menghadapi problem internal berupa perebutan tahta antar-anggota keluarga kerajaan. Masing-masing Pangeran berebut untuk menduduki kursi raja Brunei. Tidak jarang, di antara mereka terlibat perang saudara, yang menyebabkan kehancuran di antara mereka (Singh, 1984; dan Saunders, 2002).

Pada posisi inilah, kehadiran orang-orang Inggris dibutuhkan. Dalam konteks sosial-politik Brunei, dalam beberapa kasus, Inggris tampil sebagai penengah. Tentu saja, kerja mereka bukan tanpa imbalan. Terkadang imbalan yang harus diberikan cukup besar, seperti penyerahan wilayah. Praktek-praktek seperti itu, belakangan, membuat negeri-negeri bawahan Brunei semakin sedikit dan menyempit (Rahman, 1995; dan Mail, 2011).

Keadaan di Brunei sebenarnya mirip dengan yang terjadi di kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah, sekitar abad ke-18. Sultan Amangkurat I (memerintah 1646-1677) dan Sultan Amangkurat II (memerintah 1677-1703) begitu percaya bahwa hanya kekuatan Belanda yang mampu melumpuhkan sejumlah pemberontakan yang terjadi di wilayah bawahan Mataram (de Graaf, 1987a, 1987b dan 1987c). Belanda hadir dengan kekuatan militer yang sama sekali berbeda dengan yang dimiliki oleh pasukan Jawa pada umumnya (Boxer, 1983; dan Ricklefs, 1992).

Orang-orang Belanda, tentu saja, setuju untuk membantu Sultan Mataram asalkan diberikan kebebasan untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Pihak kompeni Belanda memang tidak menguasai wilayah pesisir tersebut, namun hanya diperbolehkan melakukan monopoli perdagangan di sana. Secara berkala, pihak Belanda juga harus membayar

kompensasi tahunan kepada Sultan Mataram. Walaupun kedaulatan Sultan tetap dijunjung tinggi; namun, di sisi lain, pemasukan kerajaan semakin berkurang, karena keuntungan yang lebih besar dilarikan ke Batavia, atau Jakarta sekarang, sebagai pusat pemerintahan kompeni Belanda (de Graaf, 1987a, 1987b dan 1987c; Ricklefs, 1992; Kartodirdjo, 1995; dan Vlekke, 2008).

Menurut suatu sumber Belanda dikatakan bahwa menginjak tahun 1888, Brunei dan Serawak, yang dalam istilah Belanda disebut *British Noord-Borneo*, termasuk kedalam protektorat Inggris. Disebutkan juga bahwa kawasan Borneo Utara bagian tengah disesaki oleh pegunungan Kinabalu, yang dari muaranya mengalir sungai-sungai kecil atau besar, seperti sungai Kina Batangan. Dua wilayah itu mempunyai garis pantai yang panjang dan berlumpur (Schuiling, 1907:98).

Teluk Sandakan menjadi pelabuhan internasional yang kerap disinggahi oleh perahu-perahu dari Hongkong, yang akan berlabuh ke Australia atau sebaliknya. Hongkong, Borneo Utara, dan Australia telah berada dalam kendali kerajaan Inggris. Tentu saja, hal itu bukan sekedar kebetulan untuk membangun jalur tol laut yang menghubungkan negeri bawahan atau negeri yang bermitra dengan Inggris (Schuiling, 1907:99; Black, 1983; dan Singh, 2000).

Berikut ini merupakan sekelumit pandangan penulis tentang sejarah Brunei. Terlepas dari perbedaan cara menghadapi orang Eropa, yang dalam sejarah Indonesia lebih banyak ditempatkan sebagai antagonis, perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh perangkat-perangkat istana Brunei pada masa silam. Sultan Brunei telah memilih untuk berkoordinasi dengan pihak kerajaan Inggris guna memodernisir kerajaan Brunei Darussalam menjadi kekuatan yang berjaya, terjamin keamanannya, dan

terselenggara pembangunannya. Inggris memainkan peran yang tidak sedikit untuk membantu Brunei menapaki puncak-puncak kegemilangannya.

Brunei yang masih bertahan dengan status monarkinya menjadi bahan renungan yang berharga bagi negeri-negeri jiran lainnya di kawasan Asia Tenggara. Terkadang, nuansa politik yang kondusif dan terstruktur, namun cenderung satu arah, dibutuhkan untuk mengantar Raja dan masyarakatnya kearah keadaan yang serba sejahtera. Untuk itu, pihak istana perlu tampil sebagai pembawa obor tunggal mengenai kebijakan apa yang ditempuh guna merealisasikan suatu kemajuan (Al-Sufri, 1992; Hussainmiya, 1995; Mail, 2011; dan Rahman, 2016).

Semua jalan bisa dilalui, termasuk bekerjasama dengan orang asing, guna menciptakan kehidupan kerajaan yang modern dan berkemajuan. Itulah yang terpapar dalam kisah kerjasama antara kesultanan Brunei Darussalam dengan kerajaan Inggris dalam menapaki sejarahnya yang dinamis (Al-Sufri, 1992; Hussainmiya, 1995 dan 2006; Mail, 2011; dan Rahman, 1995 dan 2016).

Singapura: Pulau Multikultural.

Pulau Singapura, biasa disebut *Tumasik* atau *Temasek* sebelum abad ke-19, tidak diperhitungkan sebagai pulau penting di perairan Asia Tenggara. Sebelumnya, pulau tersebut tidak sebesar sekarang; dan hanya didiami oleh sekumpulan kecil nelayan pribumi, yang mengisi kesehariannya dengan melaut atau memelihara ikan di dalam keramba. Perubahan pesat terjadi ketika pulau itu dikelola oleh kerajaan Inggris. Dengan cepat, pulau Singapura menjelma menjadi bandar dagang yang diperhitungkan di dunia (King, 2008; dan Turnbull, 2009).

Singapura modern tercipta berkat perjanjian antara Tumenggong Johor, Abdul Rahman, dengan Sir Thomas Stamford Raffles, perwakilan EIC (*East India Company*) pada tanggal

30 Januari 1819, yang mengizinkan Inggris untuk membangun bandar niaga di sana (Trocki, 2007; Turnbull, 2009:24-25; dan Baker, 2012). Singapura-Inggris ini masih berada di bawah *Straits Settlement*, yang berkedudukan di Pulau Pinang, Malaysia, pada waktu itu (Lysa & Jianli, 2008:4; dan Baker, 2012).

Sebelum disesaki oleh bangunan berarsitektur Eropa, pemukiman orang Singapura berpusat di sekitar rumah Tumenggong. Rumah itu terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung, mirip dengan yang dijumpai pada rumah orang laut. Di sekitar rumah terdapat banyak perahu kayu yang tertambat. Tumenggong Johor mempunyai hubungan yang baik dengan orang laut. Kelompok orang laut, yang bernama *Orang Galam*, menjadi mitra menguntungkan bagi Tumenggong Johor, yang sering menyuplai ikan kepadanya (Trocki, 2007; Turnbull, 2009; dan Baker, 2012).

Menurut kacamata orang Eropa, Singapura sebelum kedatangan Inggris mempunyai reputasi yang buruk, yakni sebagai tempat persinggahan para penyelundup, bajak laut, dan para criminal lainnya, serta dianggap berbahaya bagi bangsa-bangsa Eropa di perairan Selat Malaka (Tarling, 1990; dan Turnbull, 2009:24-25).

Kepercayaan pihak Johor kepada Inggris dalam mengelola Singapura tidak terlepas dari kontribusi Inggris untuk menjadi tameng Johor atas ancaman Belanda. Negeri Johor menjadi kompetitor yang menyulitkan kuasa-kuasa besar di Selat Malaka untuk mengembangkan potensi ekonomi dan politiknya. Singapura dianggap oleh Inggris menempati titik geografi yang strategis di ujung Selat Malaka. Sementara itu, di sisi lain, ianya terhubung dengan jalur ke China (Trocki, 2007; Turnbull, 2009; dan Baker, 2012).

Sejak abad ke-18, Inggris mempunyai hubungan dagang yang

baik dengan China. Inggris mendirikan perkantoran, perumahan, dan gudang di Singapura. Inggris lebih dekat dalam menjalin komunikasi dengan para Sultan Melayu dan China, ketimbang dari pos utama mereka di Asia Tenggara, yakni di Bengkulu, Sumatera bagian barat daya (Bowen, Lincoln & Rigby, 2002; dan Abshire, 2011:33-36).

Meskipun orang-orang Inggris bertindak sebagai *officer* di Singapura, mereka tentu saja tidak bisa terlepas dari orang-orang Melayu. Orang Melayu banyak dipekerjakan di segenap lapisan, sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Tidak sedikit dari orang Melayu yang terdidik, dan mengerti bahasa asing, ditempatkan di kantor-kantor pemerintah koloni Inggris. Mereka membantu pekerjaan yang diemban oleh atasan, seperti di bidang persuratan dan bertindak selaku penerjemah di saat-saat yang dibutuhkan (Turnbull, 2009:32; dan Baker, 2012). Kelas Melayu menengah ke bawah banyak yang menggantungkan hidup mereka dalam bidang perikanan, pelayaran, dan perniagaan. Bahkan beberapa orang Melayu juga dipekerjakan menjadi kuli (Warren, 2003:5; Nasir, 2007; dan Rahim, 2009).

Orang China memiliki peranan penting dalam perekonomian Singapura (Cushman & Gungwu, 1991; Huff, 1994:8; dan Widiyanta, 2010). Sama dengan Melayu, mereka juga mengisi pos-pos yang bergerak di bidang barang dan jasa. Beberapa dari mereka, bahkan ada yang menjadi agen barang-barang khusus dari China daratan. Para pedagang Inggris tidak perlu repot-repot berlayar sampai ke China untuk mendapat barang pesanannya, cukup bertransaksi dengan perwakilannya saja di Singapura (*cf* Tan, 2003; Baker, 2012; dan Poelinggomang, 2016:40-42).

Singapura menerapkan sistem pelabuhan bebas. Kebijakan ini memungkinkan para saudagar

dan pelaut dari seluruh dunia untuk bersandar dan bertransaksi secara leluasa. Upah bea masuk pelabuhan disesuaikan, sehingga tidak memberatkan para pelangan. Kebijakan tersebut telah mencekik pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta sekarang), yang justru menerapkan kebijakan yang lebih tertutup. Akibat bea masuk di pelabuhan-pelabuhan yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda amat tinggi, ianya menyebabkan bandar-bandar di Indonesia menjadi sepi. Kapal-kapal asing lebih memilih Singapura sebagai tempat berniaga (Ho, 1996; Arnita, 2014; dan Poelinggomang, 2016).

Selain karena alasan bea yang terjangkau dan kebijakan yang lebih longgar, ketimbang pelabuhan yang dikelola oleh pihak kolonial Belanda di Indonesia, faktor lain yang menyebabkan Singapura menjadi bandar niaga terdepan di Asia Tenggara adalah azas humanismenya. Pemerintah Singapura memperhatikan hak dan kewajiban para pedagang pribumi serta Nusantara, seperti Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Bajo, yang setara dengan para pedagang China (Ho, 1996; Ooi & Shaw, 2004; dan Poelinggomang, 2016:53).

Hal itu berkebalikan dengan politik pribumi dari pihak kolonial Belanda yang cenderung rasis, yakni menempatkan stratifikasi seseorang berdasarkan suku bangsanya. Orang Eropa ditempatkan di puncak piramida sosial, sedangkan orang pribumi dimasukkan kedalam kelompok terbawah. Klasifikasi sosial tersebut juga berimplikasi pada hak dan kewajiban mereka selaku warga negara (Abdullah ed., 1992; Ricklefs, 1992; dan Kartodirdjo, 1995).

Sir Thomas Stamford Raffles bukanlah Residen pertama Singapura, ia adalah fasilitator yang membenahi pemerintahan dan manajemen perekonomian. Setelah tiang

pancang pemerintahan ditanam, ia meninggalkan pulau tersebut dan ditugaskan ke Bengkulu di Sumatera bagian barat daya. Posisi Sir Thomas Stamford Raffles, kemudian, digantikan oleh William Farquhar, yang merupakan Residen Singapura-Inggris pertama (Wake, 1975; Liu, 2001; Bowen, Lincoln & Rigby, 2002; dan Baker, 2012:85).

Pada masa pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles, kedudukan orang Melayu dimuliakan dan ditempatkan pada derajat yang terhormat. Mereka bukan hanya dianggap sebagai pribumi, tetapi juga representasi dari kuasa Johor, kerajaan yang sebelumnya menguasai Singapura. Untuk menciptakan ketertiban, Sir Thomas Stamford Raffles mengangkat dua pemuka masyarakat Melayu yang bergelar *Kapitan* (Wake, 1975; Rahim, 1998 dan 2009; dan Turnbull, 2009).

Kapitan Melayu bertugas menjaga kedamaian dan keteraturan di dalam komunitas mereka sendiri. Pada masa William Farquhar, Residen Singapura itu menghadiri rapat dewan masyarakat Singapura sekali dalam seminggu. William Farquhar akan mendengar sejumlah laporan dari para *Kapitan*, termasuk *Kapitan* Melayu (Turnbull, 2009:32).

Pada pertengahan abad ke-19, perubahan wajah Singapura semakin terlihat. Pemukiman di hilir sungai Singapura semakin meruyak. Diketahui bahwa 40 persen dari penduduk Singapura adalah China. Mereka berasal dari berbagai sub-suku China daratan; dan sebagian yang lain adalah China peranakan dari Riau dan Kalimantan. Hutan yang berada di pedalaman Singapura diganti menjadi lahan pertanian (Liu, 2001:19-20).

Dalam telaah lain disebutkan bahwa Singapura, pada abad ke-19, mewakili suatu kota urban di Asia Tenggara. Perkembangan yang massif itu didorong oleh faktor diterapkannya

hukum tata-kota *a la* Eropa, *a la* kota model. Kondisi kota yang ada dianggap tidak layak, jika bersandar pada konsep pemukiman orang Melayu, yang semestinya harus segera diperbaharui (Liu, 2001; dan Lysa & Jianli, 2008).

Pemukiman di kota urban tersebut mampu bergerak secara mandiri, tanpa mempertimbangkan lagi hubungan yang erat dengan wilayah pedalaman. Ini adalah sesuatu yang berseberangan dengan model kota Melayu di masa-masa sebelumnya, yang mempertalikan wilayah hulu dan hilir (Huff, 1994; dan King, 2008).

Tidak hanya di Singapura, di Kuala Lumpur, Seremban di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, dan Ipoh di Negeri Perak, orang-orang Melayu telah menempati lapisan masyarakat bawah. Jumlah mereka kerap kali lebih sedikit ketimbang suku bangsa non-Melayu. Biasanya, pemukiman orang-orang Melayu terletak di bagian terluar perkotaan. Mereka membentuk *enclave*, atau pemukiman, yang dilatarbelakangi oleh suatu kesamaan, baik ras, agama, maupun kemiripan tertentu. Di beberapa titik, pemukiman orang-orang Melayu disebut “Kampung Bahru”, merujuk kepada transplantasi dari kehidupan masyarakat rural ke masyarakat urban (Chee, 1982:193).

Berada di bawah Residensi Inggris, tidak membuat orang Melayu gentar melebarkan sayap ekonominya. Sebelum Inggris hadir di perairan Malaka, para aristokrat dan pemimpin Melayu telah memainkan monopoli dagang, yang dibarengi dengan besarnya pengaruh politik mereka. Mereka memiliki relasi bisnis yang luas dengan para pemuka Melayu atau kelompok masyarakat non-Melayu lainnya (Chee, 1982:194; dan Abshire, 2011). Besar kemungkinan, jaringan tersebut masih mereka gunakan sebagai wahana untuk mendapatkan penghasilan.

Pasar bebas yang diusung oleh Singapura, nampaknya, ikut

mempengaruhi gejolak politik di Asia Tenggara pada abad ke-19. Di beberapa belahan Nusantara, misalnya, sedang terjadi peperangan antara penduduk pribumi melawan pemerintah kolonial Belanda (Abdullah ed., 1992; Ricklefs, 1992; dan Kartodirdjo, 1995). Guna mengimbangi modernitas persenjataan musuh, beberapa pejuang menjalin kontak dengan para pedagang dari Singapura guna mendapatkan senjata (Elvian, 2012; Madjid, 2015, 2017a dan 2017b; dan Erman, 2017).

Hal tersebut ditemukan dalam sejumlah arsip Belanda di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam perang rakyat Bangka sebelumnya. Senjata-senjata tersebut harus melewati perjalanan yang panjang dan sulit, hingga sampai ke tangan para pejuang (Madjid, 2015, 2017a dan 2017b).

KESIMPULAN ⁴

Bangka, Brunei, dan Singapura merupakan bagian kecil dari dialektika

⁴**Sebuah Pengakuan:** Artikel ini, sebelum dikemas kini dan disempurnakan dalam bentuknya sekarang, sedianya akan didiskusikan dalam agenda “Edu-Tourism with an International Conference, organized by ASPENSI (*Association of Indonesian Scholars of History Education*) in Bandung and BRIMAN (Brunei-Indonesia-Malaysia Academic Network) Institute in Bandar Seri Begawan; and sponsored by UNIPA (University of PGRI Adibuana) Surabaya and UBD (University of Brunei Darussalam) in Bandar Seri Begawan, in Bandung, West Java, Indonesia, on August 1-5, 2018”. Adalah merupakan sebuah kehormatan bagi saya berada dihadapan peserta dari berbagai negara, yakni: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Philippines. Agenda seperti ini mengingatkan saya pada peristiwa KAA (Konferensi Asia-Afrika) pada 63 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18-24 April 1955, yang melahirkan persetujuan dan dikenal dengan nama “Dasasila Bandung”. Kini, dalam ruang dan waktu yang berbeda, kita seyogyanya berbahagia dan bangga karena terkukuhkannya Pengurus ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) untuk periode 2018-2023. Mereka dipercaya untuk mendayung perahu akademik, meski menghadapi gelombang yang tidak takut kena diterpa, sampai pada tujuan yang dicita-citakan dan akhirnya, insya Allah, maju jaya. Sahabat kita adalah orang-orang Melayu di kawasan Asia Tenggara. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, walaupun seluruh isi dan interpretasi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab akademik penulis sendiri secara pribadi.

besar orang Melayu dalam menghadapi kolonialis Eropa. Meskipun sesama Melayu, ternyata dalam bidang politik, pandangan mereka bersifat distingtif. Sebagian ada yang berkoordinasi dengan orang Eropa dan menjadikan mereka sebagai rekan yang menguntungkan; namun, di sisi lain, ada yang dengan tegas meneriakkan perang kepada bangsa Eropa.

Singapura menjadi bandar dagang yang menghubungkan Bangka dan Brunei, termasuk wilayah Melayu lainnya. Pada awalnya, Singapura merupakan wilayah kuasa kesultanan Johor, yang kemudian dikelola oleh pihak Inggris. Sekitar abad ke-19, Singapura tampil sebagai bandar dagang internasional yang mengusung kebijakan pasar bebas. Bandar tersebut juga digunakan oleh kesultanan Brunei untuk memasarkan produk-produk mereka.

Kerjasama dalam bidang perdagangan ini menjadi latarbelakang eratnya hubungan antara Inggris dengan Brunei Darussalam. Bagi Brunei, hubungan tersebut amat penting guna menangkal ancaman yang datang dari pihak Belanda. Dari pulau yang dahulu bernama Tumasek, para pasukan Depati Amir di Bangka, misalnya, mendapat senjata api untuk melawan kedudukan Belanda di wilayah mereka, yang didatangkan dari Singapura.

Ketiga daerah di atas (Bangka, Brunei, dan Singapura) juga bergumul dengan problematikanya masing-masing. Orang Melayu menghadapi masa, di mana kedudukan mereka berada di persimpangan jalan. Mereka harus tetap menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri, atau menyerahkan kedaulatan mereka kepada para pendatang asing.

Terlepas dari itu, sejarah telah bergulir. Orang-orang Eropa datang dengan pembaruan; dan harus diakui, kita ikut tercerahkan berkat peranan mereka. Namun, di sisi lain, mereka

juga menanamkan kebencian, terutama bagi negeri-negeri yang sebelumnya pernah dijajah. Ingatan tersebut akan menjadi imaji yang terus mengendap di masa-masa yang akan datang. Seperti itulah keadaannya bagi bangsa-bangsa Melayu yang ada di rantau Asia Tenggara.⁵

Referensi

- Abdullah, Husnial Husin. (1983). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka Belitung*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- Abdullah, Taufik [ed]. (1992). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abshire, Jean. (2011). *The History of Singapore*. t.tp. [tanpa tempat]: Penerbit ABC-CLIO.
- Alfian, Ibrahim [ed]. (1984). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatra Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Al-Sufri, Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama Haji Awang Mohd Jamil. (1992). *Liku-liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah dan Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.
- Andaya, B.W. & L.Y. Andaya. (2001). *A History of Malaysia*. Honolulu: University Hawaii Press.
- Arnita, Devi. (2014). "Strategi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai International Hub Port: Studi Banding dengan Pelabuhan Singapura". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Bogor: SPs IPB [Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor]. Tersedia secara online juga di: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Bakar, A.A. (1969). *Bahrin – Amir – Tikal: Pahlawan-pahlawan Nasional jang Tidak Boleh Dilupakan*. t.tp. [tanpa tempat]: Jajasan Pendidikan Rakjat Bangka.
- Baker, Jim. (2012). *A Popular History of Malaysia and Singapore*. Singapore: Marshall Cavendish.
- Barnard, Timothy P. [ed]. (2004). *Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries*. Singapore: Singapore University Press.

⁵**Pernyataan:** Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri, ianya bukan hasil plagiat, karena semua sumber yang saya kutip dalam teks disebutkan secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim untuk direviu dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya.

- Bellwood, Peter. (2007). *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Canberra: ANU [Australian National University] e-Press, revised edition.
- “Besluit, 25 Maret 1851, No.13”. *Arsip Kolonial Belanda Tidak Diterbitkan*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- Black, Ian. (1983). *A Gambling Style of Government: The Establishment of the Chartered Company’s Rule in Sabah, 1878-1915*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Bowen, H.V., M. Lincoln & N. Rigby. (2002). *The Worlds of the East India Company*. UK [United Kingdom]: Boydell & Brewer.
- Boxer, C.R. (1983). *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai, 1602-1799*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, terjemahan Bakri Siregar.
- Carey, Peter. (2008). *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi tentang Cina, 1755-1825*. Jakarta: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Carey, Peter. (2014). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785 – 1855)*. Jakarta: Penerbit Kompas, Terjemahan.
- Chee, Tham Seong. (1982). “Rural and Urban as Categories in Malay Life: An Interpretation” in *Archipel*, Volume 24.
- Christanty, Linda. (2010). “Sejarah Hubungan Indonesia – Malaysia dan Kolonialisme di Asia Tenggara”. Tersedia secara online di: <https://indoprogress.com/2010/10/sejarah-hubungan-indonesia-malaysia-dan-kolonialisme-di-asia-tenggara/> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Coedes, Georges. (2017). *Asia Tenggara Masa Hindu-Budha*. Jakarta: Penerbit KPG [Kepustakaan Populer Gramedia], Terjemahan.
- Cresswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Cribb, Robert. (1988). “Opium and Indonesian Revolution” in *Modern Asian Studies*, Vol.22, No.4, pp.701-722.
- Cushman, Jeniffer & Wang Gungwu. (1991). *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- de Graaf, H.J. (1987a). *Disintegrasi Mataram di Bawah Amangkurat I*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, Terjemahan.
- de Graaf, H.J. (1987b). *Runtuhnya Istana Mataram*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, Terjemahan.
- de Graaf, H.J. (1987c). *Terbunuhnya Kapten Tack*. Jakarta: Pustaka Grafitipers, Terjemahan.
- Dobbin, Christine. (2008). *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Perang Padri*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Donkin, Robin A. (2003). *Between East and West: The Moluccas and the Traffic in Spices Up to the Arrival of Europeans*. UK [United Kingdom]: Diane Publishing Company.
- Dunggio, P.D. et al. (1983). *Struktur Bahasa Melayu Palembang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Elvian, Akhmad. (2012). *Perang Bangka Tahun 1812-1851 Masehi*. Pangkal Pinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Epp, Franz. (1852). *Schilderungen aus Hollandisch-Ostinden*. Heidelberg: J.C.B. Mohr.
- Erman, Erwiza. (2009). *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Erman, Erwiza. (2017). “Menyigi Sejarah Perjuangan Bangka: Depati Bahren dan Depati Amir”. *Makalah* disampaikan dan didiskusikan di Bangka, Indonesia.
- Ferguson, Niall. (2004). *Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power*. London: Basic Books.
- Fieldhouse, David Kenneth. (1999). *The West and the Third World: Trade, Colonialism, Dependence, and Development*. London: Blackwell Publishing.
- Ghofur, Abd. (2015). “Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis” dalam *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.1 [Januari-Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Gouda, Frances. (2007). *Dutch Cultures Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Jakarta: Penerbit Serambi, Terjemahan.
- Gould, S. Baring & C.A. Bampfylde. (1989). *A History of Sarawak under its Two White Rajahs*. Singapore: OUP [Oxford University Press].
- Halkis, Muhammad. (2014). “Tinjauan Sosial-Politik terhadap Islam dan Tamadun Melayu di Asia Tenggara: Tantangan dan Harapan” dalam *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.6, No.1 [Januari-Juni]. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/40334-ID> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Hall, Kenneth R. (1985). *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- “Hasil penuturan Ali Usman, pemandu ekspedisi penelusuran jejak Depati Amir di Bangka, pada tanggal 20-22 November 2015”. *Catatan Penuturan Tidak Diterbitkan*, ada pada penulis.
- Ho, David K.H. (1996). *The Seaport Economy: A Study of the Singapore Experience*. Singapore: Singapore University Press.

- Huff, W.G. (1994). *The Economic Growth of Singapore: Trade and Development in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hussainmiya, B.A. (1995). *Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hussainmiya, B.A. (2006). *Brunei Revival of 1906: A Popular History*. Bandar Seri Begawan: Brunei Press Sdn Bhd.
- "Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848". *Arsip Kolonial Belanda Tidak Diterbitkan, Terjemahan Tahun 1973*. Jakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].
- ISEAS [Institute of South East Asian Studies]. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: ISEAS Press.
- Jumhari. (2010). *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi*. Padang: BPSNT Padang Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. (1995). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium hingga Imperium, Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- King, Rodney. (2008). *The Singapore: Miracle, Myth, and Reality*. Singapore: Insight Press.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah FS UGM [Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada].
- Leake, David. (1990). *Brunei: The Modern Southeast Asian of Islamic Sultanate*. Kuala Lumpur: Forum Publisher.
- Liu, Gretchen. (2001). *Singapore: A Pictorial History, 1819-2000*. t.tp. [tanpa tempat]: Psychology Press.
- Lysa, Hong & Huang Jianli. (2008). *The Scripting of a National History: Singapore and its Past*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Madjid, M. Dien. (2015). *Berebut Tahta di Pulau Bangka: Ketokohan Depati Amir dalam Catatan Belanda (Suatu Kajian Arsip)*. Jakarta: Penerbit PUSLITPEN UIN [Pusat Penelitian dan Penerangan, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.
- Madjid, M. Dien. (2017a). "Depati Amir and Chinese People's Resistance against Dutch Colonialism in Bangka, 1848-1851: An Archival Study" in *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, Vol.9(1), October, pp.33-48. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UIN SGD Bandung, ISSN 2085-0980.
- Madjid, M. Dien. (2017b). "Depati Amir, Orang Cina, dan Pengasingannya". Tersedia secara online di: <https://sportourism.id/heritage/depati-amir-orang-cina-dan-pengasingannya> [diakses di Ciputat, Indonesia: 15 Januari 2018].
- Madjid, M. Dien et al. (2017). *Resistensi di Cawan Sumatera Abad XX: Depati Parbo dan Perang Kerinci dalam Laporan Kolonial Belanda*. Jakarta: Penerbit PUSLITPEN UIN [Pusat Penelitian dan Penerangan, Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.
- Mail, Haji Awang Asbol bin Haji. (2011). *Kesultanan Melayu Brunei Abad ke-19: Politik dan Struktur Pentadbiran*. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam.
- Mustafa, Zulkarnain et al. (1984). *Struktur Bahasa Melayu Bangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mutawalli. (2012). "Perang Bangka". Tersedia secara online di: <http://kesultanan-palembang.blogspot.co.id/2012/01/perang-bangka-by-drs.html> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Nasir, Kamaludeen bin Mohamed. (2007). "The Muslim Power Elites in Singapore: The Burden of a Community". *Unpublished Ph.D. Thesis*. Singapore: NUS [National University of Singapore].
- Nawiyanto & Eko Crys Endrayadi. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press dan Penerbit Tarutama Nusantara. Tersedia secara online juga di: <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/75333/Nawiyanto> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Ooi, Giok Ling & Brian J. Shaw. (2004). *Beyond the Port City: Development and Identity in 21st Century Singapore*. Singapore: Prentice Hall.
- Poellingomang, Edward L. (2016). *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Maritim*. Jakarta: Kelompok Penerbit Gramedia.
- Rahim, Lily Zubaidah. (1998). *The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay Community*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rahim, Lily Zubaidah. (2009). *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*. Perth, Australia: Murdoch University Press.
- Rahman, Haji Abdul Karim bin Haji Abdul. (1995). "Brunei Abad ke-XIX: Suatu Cabaran dan Campur Tangan British" dalam *Jurnal Darussalam*, Bil.2. Bandar Seri Begawan: Jabatan Pusat Sejarah Brunei.
- Rahman, Haji Abdul Karim bin Haji Abdul. (2016). "Sejarah Pengasasan dan Asal-Usul Kerajaan Brunei Berdasarkan Sumber Lisan". *Tesis Doktor Tidak Diterbitkan*. Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains

- Sosial. Tersedia secara online juga di: http://studentsrepo.um.edu.my/6454/1/HAJI_ABDUL_KARIM_BIN_HAJI_ABDUL_RAHMAN.pdf [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Reid, Anthony. (2001). "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities" in *Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 32(3), pp.295-313.
- Reid, Anthony. (2004). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, terjemahan Sori Siregar, Hasif Amini & Dahris Setiawan.
- Ricklefs, M.C. (1992). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Terjemahan.
- Ricklefs, M.C. et al. (2013). *Sejarah Asia Tenggara*. Depok: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- Rush, James R. (2000). *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial, 1860-1910*. Yogyakarta: Penerbit Mata Bangsa, Terjemahan.
- Saunders, Graham E. (2002). *A History of Brunei*. London: Routledge.
- Schuilng, R. (1907). *Neerlands Kolonien*. Zutphen: Thieme.
- Singh, D.S. Ranjit. (1984). *Brunei, 1839-1983: The Problems of Political Survival*. Singapore: OUP [Oxford University Press].
- Singh, Ranjit. (2000). *The Making of Sabah, 1865-1941: The Dynamics of Indigenous Society*. Kuala Lumpur: UM [University of Malaya] Press.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sujitno, Sutedjo. (2007). *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia: Abad ke-18 hingga Abad ke-20*. Bangka: PT Timah (Tbk).
- Sujitno, Sutedjo. (2011). *Legenda dalam Sejarah Bangka*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- Suprpto, Sabtando Joko. (2010). "Potensi, Prospek, dan Pengusahaan Timah Putih di Indonesia". *Makalah Ilmiah Tidak Diterbitkan*. Tersedia secara online juga di: http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Susanto, Heri. (2016). "Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara" dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Th.X, No.2 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <http://webcache.googleusercontent.com/search> [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Sutrisno, Sulastin. (2001). *Dari Lima Penjajahan menuju Zaman Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Indira.
- Tan, Eugene K.B. (2003). "Re-Engaging Chineseness: Political, Economic, and Cultural Imperatives of Nation-Building in Singapore" in *China Quarterly*, 175, pp.751-774. Available online also at: http://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/865 [diakses di Ciputat, Indonesia: 27 Desember 2017].
- Tarling, Nicholas. (1990). *Piracy and Politics in the Malay World: A Study of British Imperialism in the Nineteenth Century South East Asia*. Singapore: Donald Moore Gallery.
- Trocki, Carl A. (2007). *Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885*. Singapore: NUS [National University of Singapore] Press, second edition.
- Turnbull, C.M. (2009). *A History of Modern Singapore, 1819-2005*. Singapore: NUS [National University of Singapore] Press.
- Veer, Paul van't. (1985). *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hourgronje*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers, Terjemahan.
- Vlekke, Bernard H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Terjemahan.
- Wake, C.H. (1975). "Raffles and the Rajas: The Founding of Singapore in Malayan and British Colonial History" in *JMBRAS*, 48(1), pp.47-73.
- Warren, James Francis. (2003). *Rickshaw Coolie: A People's History of Singapore, 1880-1940*. Singapore: NUS [National University of Singapore] Press.
- Widiyanta, Danar. (2010). "Keberadaan Etnis Cina dan Pengaruhnya dalam Perekonomian di Asia Tenggara" dalam *Jurnal MOZAIK*, Vol.V, No.1 [Januari].
- Widja, I Gde. (1989). *Sejarah Lokal: Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Zain, Shahrir bin Mohamad. (1992). "Asal-Usul Melayu dan Hubungan Bahasa dengan Peradaban Bangsa" dalam *Jurnal Dewan Bahasa*, Mac, ms.270-278.
- Zulkarnain, Iskandar. (2003). *Konflik Pertambangan Timah di Bangka Belitung*. Jakarta: LIPI [Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] Press.